

**MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Polsek Manggala)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Alauddin
Makassar

Oleh :

SUSIANTI
NIM. 10300113182

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL
MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Polsek Manggala)

Oleh :

SUSIANTI
NIM. 10300113182

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Alauddin
Makassar

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susianti
NIM : 10300113182
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 20 Juli 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Kctatancgaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga No. 112
Judul : Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif
Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek
Manggala)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kedaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemuadian hari terbukti bahwa ia metupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 18 Juli 2017

Penyusun,



SUSIANTI

NIM: 10300113182

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala), yang disusun oleh Susianti, NIM. 10300113182, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 14 Agustus 2017, bertepatan dengan 21 Dzulqa’dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 21 Agustus 2017 M
28 Dzulqa’dah 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra.Nila Satrawati M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph. D	(.....)
Munaqisy II	: Rahmiati, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Usman, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr.Sohrah, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

MOTTO:

“Hai orang-orang yang beriman,
jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. al-Baqarah:153)

Persembahan:

“Aku persembahkan cinta dan kasihku kepada
Orangtuaku dan Adikku tercinta yang telah menjadi
motivasi dan inspirasi bagiku serta tiada henti
memberikan dukungan dan do’a untukku”

ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. Tuhan Yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Tuhan Yang Maha Penyayang tak pilih sayang, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., Nabi sang revolusioner sejati yang telah mengubah paradigma manusia dari zaman kebiadaban menuju jalan yang berperadaban.

Skripsi ini berjudul Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, konsentrasi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Tidak sedikit kendala dan hambatan yang dialami dalam penyusunan karya ini, namun Alhamdulillah berkat inayah dari Allah swt. dan optimisme yang didorong oleh kerja keras yang tak kenal lelah, serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan support, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Mansur dan ibunda Hernawati yang telah memberikan perjuangan berupa pengorbanan materi dan spritualitas dalam mendo'akan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal

2. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
3. Dra. Nila Sastawati selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, M.Hi, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Prof. Dr. Usman, MA dan Dr. Sohras, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini
5. Abdul Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D selaku penguji I dan Rahmiati, M. Pd selaku penguji II dalam penyelesaian skripsi ini
6. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum serta Staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh keluarga besar saya yang sudah banyak memberi motivasi dan selalu mendukung saya
8. Nurjannah, Multasyam Salmah, Sutriani dan Rini Alfiani Syamrah selaku kesayangan saya yang senantiasa selalu menemani, selalu memberi canda dan berdiskusi dalam berbagai hal
9. Nur wahyuni selaku teman kelas yang selalu setia menemani proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
10. Teman-teman Korp Sukarela (KSR) Unit 107 Uin Alauddin Makassar
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 55 Uin Alauddin Makassar
12. Misnawati S.H.I yang selalu memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Kakanda Normansyah yang luar biasa membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini

14. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang juga telah membantu dan menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan besar semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam melanjutkan tradisi akademis, meskipun karya tulis ini masih banyak kekurangan, dengan lapang dada mengharapkan masukan, saran, dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. Panjatkan do'a, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah swt., dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin...

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Gowa, 20 Juli 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Susianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Pengertian Mediasi penal	13
B. Langkah-langkah Mediasi di Luar Pengadilan	17
C. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam	19
D. Tindak Pidana Penganiayaan	20
E. Klasifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi Penal.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Setting Kepolisian Sektor (Polsek) Manggala	39
B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan.....	44
C. Akibat Hukum Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan	50
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan.....	53

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Hal
1.	Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
2.	Sumber Data Primer.....	34
3.	Kuat personil Polsek Manggala.....	42



DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Hal
1.	Struktur Organisasi Polsek Manggala.....	43



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِوْ	<i>fathah dan alif atau yā’</i>	ā	a dan garis di atas
اِىْ	<i>kasrah dan yā’</i>	ī	i dan garis di atas
اِوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai' un*

أَمْرٌ: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينَ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unẓila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
 Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Susianti
NIM : 10300113182
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)

Penelitian ini berjudul mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan perspektif hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi kasus di Polsek Manggala). Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Masalah tersebut dianalisis secara teoritis dan empiris ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan?, 2. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana penganiayaan?, 3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan?

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan syar'i. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kapolsek Manggala 1 orang dan Reskrim (Unit Reserse) Polsek Manggala 3 orang. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan, antara lain faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor hubungan baik, serta pertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh pelaku dan korban. Akibat hukum dari mediasi penal ini adalah jika pelaku dan korban dalam kasus penganiayaan ini ingin berdamai atau mediasi di Polsek Manggala, maka kasus tersebut akan dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan dengan menandatangani surat pernyataan damai. Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam, penganiayaan merupakan jarimah *qishash-diyat* yang penyelesaiannya diterapkan melalui *islah* dengan kemampuan korban melakukan pembayaran *diyat*.

Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu membuat undang-undang dan batasan-batasan untuk tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal di tingkat Kepolisian dan pemerintah perlu membuat undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan mediasi penal di tingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya di lapangan ada dasar hukumnya. Serta diharapkan mediasi penal dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dapat terealisasi dalam hukum Islam di masa yang akan datang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum.¹ Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian anggota masyarakat sering kali melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aturan normatif (perundang-undangan). Akibatnya, seringkali terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian

¹Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap* (Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4.

mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 4 KUHP yaitu:

“Dengan menganiaya disamakan sengaja merusak kesehatan”.²

Dilihat dari aspek sosiologisnya, kekerasan terhadap tubuh (penganiayaan) tersebut dapat mengancam eksistensi tubuh dan jiwa seseorang. dan jika tindakan tersebut tidak dicegah, maka kriminal akan merajalela pada perbuatan yang lebih tragis yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, al-Qur'an melarang keras terhadap tindak pidana penganiayaan serta menegaskan ancaman hukumannya secara terperinci dan berat atas orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu,

²Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP* (Cet II; Jakarta: WI Press, 2016), h. 578.

sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya untuk berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Dilihat dari tujuan hukum itu sendiri ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah kedamaian, keadilan, kefaiedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Keseluruhan itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat.³ Menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn menyatakan tujuan hukum adalah sebagai berikut:

“Dalam bukunya *“Inleding tot de Studie van het Naderlanse Recht”*, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.”⁴

Tentu saja korban penganiayaan menginginkan keadilan akibat dari tindak pidana tersebut. Dan untuk mencapai keadilan tersebut dibutuhkan hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah ke pengadilan. Namun, putusan pengadilan terkadang tidak memberikan rasa adil pada korban. Jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi penal. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah

³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 56.

⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 57.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.⁵

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ini diterapkan di Kepolisian Sektor (Polsek) Manggala sebagaimana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa dia diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Sehingga semua perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Selain itu, upaya mediasi penal dipandang sebagai cara penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jika perkara dalam tindak pidana penganiayaan ini dapat diselesaikan dengan mediasi penal, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa apabila terjadi permasalahan antara kedua belah pihak, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan cara damai (Qs. al-Hujurat/49:10).

Permasalahan terhadap kasus tindak pidana seperti penganiayaan yang diselesaikan secara mediasi penal di Polsek Manggala yaitu karena tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal dan tidak adanya batasan-batasan tentang jenis tindak pidana penganiayaan yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)”**.

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Cet I, Jakarta: Kencana, 2009), h. 8.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai “Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”. Penelitian ini bertempat di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Manggala di Jl. Lasuloro No. 171, Kec. Manggala, Kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian dari variabel yang dianggap penting, antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator⁶
- b. Penal adalah hukuman atau siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.⁷
- c. Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit dan luka⁸
- d. Menurut H. Mohammad Daud Ali bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu Negara nasional tertentu⁹

⁶ Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Luar Pengadilan* (Cet I; Makassar: Dua Satu Press, 2014), h. 80.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet V; Mataram: PT Rineka Cipta, 2007), h.

⁸ Nur Aisyah Bachri, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak* (Universitas Hasanuddin, Makassar: Repository.unhas.ac.id 2014) , h. 27. Diakses pada tanggal 08 Desember 2016.

⁹ Fatimah, *Studi Kritis terhadap Pertautan Antara Hukum Islam & Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 101.

- e. Hukum Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.¹⁰

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Mediasi	Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
Penal	Penal adalah hukuman atau siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang
Tindak Pidana Penganiayaan	Tindak Pidana Penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan rasa sakit dan luka
Hukum Nasional	Menurut H. Mohammad Daud Ali bahwa hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu Negara nasional tertentu
Hukum Islam	Hukum Islam merupakan syaria't Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.

¹⁰Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

C. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)”. Pokok masalah tersebut dibagi kedalam beberapa sub masalah yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ?
3. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ?

D. Kajian Pustaka

Ketika terjadi interaksi antara subyek hukum akan bertemu berbagai kepentingan. Ada kepentingan yang berkesesuaian dan adapula yang bertentangan. Ketika terjadi pertentangan dalam suatu interaksi, maka akan melahirkan konflik. Bagi beberapa subyek hukum untuk menyelesaikan pertentangan antara kepentingan tersebut, memilih jalan pintas. Salah satunya melalui penganiayaan. Maka untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cepat dan mudah, maka dilakukannya upaya mediasi. Mediasi yang dilakukan dalam tindak pidana penganiayaan dikenal dengan mediasi penal.

Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada tahun 2004. Buku ini menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan akibat tujuan si petindak.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan adalah berupa sanksi pidana. Dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹¹

Beberapa subyek hukum, ketika kasus tidak pidana penganiayaan sampai ke kantor polisi memilih upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa tindak pidana penganiayaan tersebut.

Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul Hukum Arbitrase yang diterbitkan oleh PT RajaGrafindo tahun 2000 menjelaskan bahwa mediasi adalah

¹¹Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP*, h. 577-578.

melibatkan pihak ketiga baik perorangan maupun itu lembaga independen yang bersifat netral dan tidak memihak yang akan berfungsi sebagai mediator.

Huala Adolf dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2004. Buku ini menjelaskan bahwa mediasi melibatkan pula pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang diterbitkan oleh Pustaka Magister tahun 2008. Buku ini menjelaskan bahwa mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik, maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan.

Ledeng Marpaun dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh yang diterbitkan oleh Sinar Grafika tahun 2005. Penjelasan dari buku ini bahwa menganiaya adalah dengan sengaja mengakibatkan luka atau sakit pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Dengan melihat beberapa buku yang dikemukakan di atas tak satu pun yang membahas tentang masalah mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan. Namun, ada beberapa buku yang menjelaskan tentang mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan tetapi belum signifikan sehingga membutuhkan penelitian lanjutan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terutama yang berkaitan dengan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan (*input*) bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian Mediasi Penal*

Sebelum membahas mengenai mediasi penal maka akan dikaji pengertian dari mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.¹

Menurut Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak- pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).²

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³ Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Cet I, Jakarta: Kencana, 2009), h. 1.

²Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h. 137.

³Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan* (Cet I; Makassar: Dua Satu Press, 2014), h. 80.

memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.⁴

Di dalam literatur-literatur yang ada, ditemukan beberapa definisi mengenai mediasi. Dari beberapa definisi tersebut, maka di dalam skripsi ini dijelaskan tiga definisi mengenai mediasi, yaitu:

- a. Menurut Toni Whatling menguraikan bahwa :

*“Mediation is a process in which an impartial third person assist those involved in conflict to communicate effectively with one another and to reach their own agreed and informed decisions concerning some, or all, of the issues undispute”*⁵

Mediasi adalah sebuah proses di mana orang ketiga yang tidak memihak membantu mereka yang terlibat dalam konflik untuk berkomunikasi secara efektif satu sama lain dan untuk mencapai keputusan mereka sendiri yang disepakati dan yang berjalan baik mengenai beberapa, atau semua, dari masalah yang tidak layak.

- b. Menurut Tolberg dan Taylor :

Mediasi adalah proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁶

- c. Menurut Garry Goopaster berpendapat bahwa :

Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai

⁴Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, *Mengenal Arbitrase* (Cet I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 16.

⁵Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, h. 78.

⁶Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, h. 79.

⁷Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 2-3.

penasihat. Pengertian yang diberikan oleh Kamus besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjdiantara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak sengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dari dalam penyelsaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memilik kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁸ Dalam perundang-undangan indonesia, mengenai mediasi dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Menurut pasal 6 ayat (3) bahwa mediasi adalah suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2).⁹

Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).¹⁰ Menurut Ms. Toulemonde (Menteri Kehakiman Perancis)

Mediasi

Penal

⁸Nur Aisyah Bachri, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiyaan yang Dilakukan oleh Anak* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014) h. 27. Repository.unhas.ac.id diakses tanggal 8 Desember 2016.

⁹Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Cet III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 35.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), h. 1.

(*penal mediation*) adalah “Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban”.¹¹

Mediasi Penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹²

Adapun konsep mediasi penal di kalangan Internasional dikenal pertama kali di *Kitchener-Ontario*, Kanada pada tahun 1974. Program ini selanjutnya menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, dan Negara-negara lain di Eropa. Di Amerika Serikat, mediasi penal pertama kali berlangsung di Elkhart-Indiana. Sedangkan di Inggris, mediasi penal ini dipraktekkan *The Exeter Youth Support Team* pada tahun 1979. Pada awalnya, mediasi penal dipakai untuk menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*youth offenders*). Namun metode ini kemudian juga dipakai untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Bahkan menurut Barda Nawawi Arief, metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana atau semua tipe tindak pidana. Mediasi penal sebagai instrument dari *restorative justice* dikenal berbagai istilah yang berbeda. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah *Victim-Offender Reconciliation Program*. Istilah ini jarang

¹¹Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, h. 1

¹²Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, h.

dipakai karena banyak pakar menilai penggunaan istilah rekonsiliasi tidak cocok karena terlalu agamis dan tidak menggambarkan proses perdamaian. Istilah yang lebih banyak digunakan selanjutnya adalah *Victim-Offender Mediation* (Mediasi antara Korban dan Pelaku). Adapun istilah penal mediation dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.¹³

B. Langkah-langkah Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya proses mediasi di luar pengadilan tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih didasarkan pada pengalaman praktisi. Oleh sebab itu, langkah-langkah dan teknik mediais dapat diperoleh dari karya-karya praktisi mediasi, khususnya para praktisi di Negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat dan Australia. Moore mengidentifikasi proses mediasi kedalam dua belas tahapan, yaitu:¹⁴

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*Intial Contact with the Disputing Parties*)
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*Selecting Strategy to Guide Mediation*)
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*Collection and Analizing Background Information*)
4. Menyusun rencana mediasi (*Designing a Plan for Mediation*)

¹³Hani Barizatul Baroroh, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), h. 196..Ejournal.uin-suka.ac.id diakses tanggal 15 Juni 2017.

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,

5. Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak (*Building Trust and Cooperations*)
6. Memulai siding mediasi (*Beginning Mediation Session*)
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*Deffining Issue and Setting Agenda*)
8. Mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pihak (*Uncovering Hidden Interest of the Disputung Parties*)
9. Mengungkapkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Options*)
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*Generation Options*).

Proses pelaksanaan mediasi dalam ketentuan Pasal 20 PP Tahun 2000 dimulai dengan pemilihan atau penunjukan mediator oleh para pihak pada lembaga penyedia jasa. Atas dasarr penunjukan, maka mediator secepat mungkin melakukan proses mediasi melalui negosiasi, fasilitasi, dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dapat mengakhiri perselisihan.

Barda Nawawi mengaraikan secara teoritis prinsip-prinsip kerja mediasi penal, yaitu:

- a. Tujuan diadakannya mediasi antara korban dan pelaku adalah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jika ini dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut dapat menimbulkan pembalasan sendiri.
- b. Mediasi penal berorientasi kepada proses. Artinya, yang perlu diperhatikan adalah adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
- c. Mediasi biasanya dilaksanakan secara informal, tidak seperti dalam proses peradilan. Pidana yang bersifat formal, kaku, dan sentralistik.

- d. Mediasi penal menghendaki adanya partisipasi aktif dan otonom dari korban dan pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan sulit untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.¹⁵

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara dua pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.¹⁶

Mediasi penal sebagai upaya perdamaian dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan memiliki tujuan dan manfaat baik itu dari segi prosesnya maupun untuk para pihak yang memilih menyelesaikan konflik melalui mediasi penal. Adapun tujuan dilakukan mediasi penal adalah menyelesaikan konflik antara pihak dengan melibatkan para pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi penal dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian konflik melalui mediasi menempatkan kedua belah

¹⁵Syarrazal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 91-92.

¹⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, h.13.

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win*).¹⁷

Penyelesaian konflik melalui jalur mediasi penal sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan mengakhiri pertengkaran mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar perkara dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan konflik, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua pihak. Mediasi Penal dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi penal diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan ke pengadilan.
- b. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

¹⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, h. 24.

- f. Mediasi memberikan hasil tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang berselisih karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.¹⁸

C. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan *Islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan. Selain *Islah*, dikenal juga dengan istilah *Hakam* yang berarti pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara para pihak yang berselisih sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan perselisihan mereka.¹⁹ Sebagaimana firman Allah swt. Qs. al-Hujuraat/ 49 : 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



¹⁸Rustan, *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, h. 96-97.

¹⁹Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Edisi I (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 119.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh rahmat.”²⁰

Dalam hukum pidana Islam, disebutkan untuk tindak pidana penganiayaan atau penyerangan terhadap badan mewajibkan *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (denda). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Mediasi penal dapat dilakukan dalam kasus *qishash diyat*²¹, karena pemaafan yang diberikan yang diberikan oleh ahli waris korban merupakan hak manusia (*haq al-adam*). Maksud dari jinayat disini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan tersebut. Dalam sanksi-sanksi *‘uqubat* terdapat *haq* seorang hamba. Dan selama berkaitan dengan *haq* hamba, maka bagi pemilik *haq* (*shahibul haq*) boleh memberikan ampunan dan menggugurkan *haq*nya.

Ketentuan mengenai *qishash* terdapat dalam al-Qur’an. Qs. al-Baqarah/2:178:

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 115.

²¹ Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْزْ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنْبِاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²²

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena dapat dapat menyadarkan orang atas kekeliruaanya. Memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain dapat mengontrol kemarahannya. nabi sendiri telah mempraktikkan tindakan memberi maaf ketika ia bersama pengikutnya di kota

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 27.

Mekkah. Nabi memberikan maaf kepada orang-orang Mekkah yang dahulu mereka telah mengejar, mengusir dan bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad saw.²³

Konsep penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam hukum Islam jauh lebih baik dibandingkan dengan konsep penyelesaian perkara pidana dalam hukum Nasional. Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, Negara, dan pelaku. Menurut Amin Suma, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah yang bias diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana Islam, seseorang melakukan pembunuhan atau penganiayaan jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas sama sekali dari hukum.²⁴

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²⁵ Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”²⁶

Dari pengertian tersebut, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

²³

²⁴ Umar Al-Tamimi, “Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Persepektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam* diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, h.450

²⁵Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 12.

²⁶Ledeng Marpaun, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh* (Edisi I; Cet III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - 2) Lukanya tubuh;
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.²⁷

Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam yaitu :

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimmuat dalam Bab XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan 358.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.²⁸

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni :

- a. Penganiayaan biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 KUHP.²⁹ Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

²⁷Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 12.

²⁸Ledeng Marpaun, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, h. 7.

²⁹Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, h. 8.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.

b. Penganiyaan ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiyaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh UU ialah penganiyaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP. Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum pidanamerumuskan sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiyaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiyaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana.

c. Penganiyaan berencana

Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiyaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiyaan berat

Penganiyaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiyaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut :

Luka berat atau luka parah antara lain :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya, itu termasuk luka berat.
- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.

- 4) Kadang dalam teks bahasa Belandanya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itukk lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.³⁰

Melihat tafsiran autentik dari isi ketentuan Pasal 354 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama adanya penganiayaan berat adalah kesengajaan untuk berbuat dan jika mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan pelakunya diancam hukuman sesuai dengan Pasal 354 KUHP.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rancana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan.

³⁰Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP* (Cet II; Jakarta: WI Press, 2016), h. 378.

Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- 3) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 4) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah.
- 5) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan disebut *jarimah qhisash*. Menurut bahasa, *qishash* merupakan turunan dari kata *qashsha yaqushshu wa qashashan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas. Sedangkan menurut istilah, *al-Jurjani* yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.³¹

Pencederaan (penganiayaan) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.³² Ketentuan hukum mengenai kisas untuk tindak pidana penganiayaan terdapat dalam Q.S Al- Baqarah/2:178 :

³¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 105.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Edisi I; Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 33.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأِتْبَاعُهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَىٰ إِلَهِهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih³³

Macam-macam tindak pidana penganiayaan dalam Islam, yaitu:

- Memisahkan anggota badan atau sejenisnya
- Menghilangkan manfaat anggota badan, tapi anggota badannya tetap ada
- Melukai kepala dan muka (*syajjah*)
- Melukai selain kepala dan muka (*al-Jirahi*)
- Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.³⁴

Idealnya suatu tindak pidana yang telah dilaporkan oleh korban (pelapor) dan di catat dalam laporan polisi, setelah melalui proses penyelidikan dan ditemukan bukti kuat (dugaan) bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana maka pihak

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 115.

³⁴ Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I*, h. 118.

kepolisian melanjutkannya pada tingkat penyidikan. Seperti yang ditegaskan pada

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa :

“Penyelidik adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.”³⁵

Setelah mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian, maka penyidik melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut berdasarkan hasil penyelidikan. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa :

“Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dalam dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipel karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.³⁶

Menurut pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia ini, kewenangan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengarah

³⁵Wacana Intelektual, *KUH Perdata, KUHP dan KUHAP*, hal. 632-633.

³⁶Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2014) h. 207.

kepada penyelidikan untuk tindakan tindak pidana.³⁷ Adapun kewenangan penyidik antara lain :

a. Karena kewajibannya :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Mencari keterangan dan bukti.
- 3) Meyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik bisa melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat,
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.³⁸

Penyidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik. Laporan penyidik tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi kontrol dan pembinaan terhadap penyidik.

Dalam Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁹ Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

³⁷Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 208.

³⁸Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 209.

³⁹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 210.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirinya.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidik.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁰

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik mengumpulkan barang bukti dan menetapkan tersangka dalam tindak pidana tersebut berwenang untuk melakukan penahanan. Pasal 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila dipergunakan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

⁴⁰Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 211-212.

3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
4. Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.⁴¹

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa proses hukum ketika terjadi suatu tindak pidana adalah dimulai dari laporan polisi yang ditindaklanjuti oleh penyidik dan diteruskan hingga proses penyidikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini dari pihak korban (pelapor), tersangka dan saksi-saksi guna membuat terang perkara tersebut.

E. Klasifikasi Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Melalui Mediasi Penal

Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan manfaatnya lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpendangan bahwa penyelesaian perkara hanya diterapkan pada perkara perdata saja, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan melalui mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum.

Kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal sebagai berikut:⁴²

⁴¹ Wacana Intelektual, Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHPA*, h. 64.

⁴² Mudzakkir, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana* (Jakarta: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 55-56.

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut⁴³ maupun aduan yang bersifat relatif⁴⁴.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium⁴⁵.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

⁴³ Delik aduan yang bersifat absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Contoh dari delik aduan absolut yaitu kejahatan penghinaan (Pasal 310s s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakannya penghinaan tersebut dalam berdinasi resmi.

⁴⁴ delik aduan relatif merupakan delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik yang termasuk delik aduan relatif ini tersebut dalam Pasal-pasal: 367,370,376,394,404, dan 411.

⁴⁵ Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdamaian, ataupun hukum administrasi), hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Mediasi merupakan bagian dari *Restorative Justice* atau keadilan restorasi. *Restorative Justice* atau keadilan restorasi adalah suatu kedekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Adapun perkara yang masuk *restoratif justice* yaitu:⁴⁶

1. Perkara-perkara yang menjadikan perhatian secara mansiawi dan sosial, yaitu:
 - a. Tersangka sudah lanjut usia
 - b. Tersangka masih anak-anak
 - c. Tersangka untuk kepentingan perut atau hidup, bukan sebagai mata pencaharian
 - d. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga dan hanya faktor kelainan saja.
2. Perkara-perkara tindak pidana yang ringan yang kerugian dibawah Rp. 2,5 Juta, yaitu:
 - a. Pasal 364 KUHP (Pencurian Ringan)
 - b. Pasal 373 KUHP (Penggelapan Ringan)
 - c. Pasal 379 KUHP (Penipuan Ringan)
 - d. Pasal 384 KUHP (Kejahatan Surat Ringan)
 - e. Pasal 407 KUHP (Pengrusakan Ringan)
 - f. Pasal 482 KUHP (Penadahan Ringan)
3. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mempunyai kriteria:
 - a. Perkara karena kelalaiannya berkendara di jalan raya menyebabkan korban meninggal dunia, namun tersangka masih ada hubungan kerja
 - b. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan mangsa.
4. Perkara perkara pidana namun atas pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan pembinaan, antara lain:

⁴⁶ "Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum", *Hukum Online*. <http://m.hukumonline.com> (27Juli 2017).

- a. Pencurian
- b. Penipuan
- c. Penggelapan
- d. Penadahan
- e. Penganiayaan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan penulis sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah Kepolisian Sektor Kota (Polsek) Manggala yang beralamatkan di Jl. Lasuloro No. 171 Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Adapun alasan penulis memilih Kepolisian Sektor Kota (Polsek) Manggala sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa :

- a. Pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan skripsi ini.
- b. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian tersebut di atas cukup mudah untuk dijangkau oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian skripsi ini nantinya, oleh karena instansi tersebut terletak dan berkedudukan di Kota Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

1. PendekatanYuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai

dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar-dasar hukum, dan konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pendekatan Syari'ah

Penelitian ini menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan mediasi dalam tindak pidana penganiayaan.

C. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun sumber data primer ini jumlahnya 4 *informan*. Dari 4 orang tersebut terdiri dari, Kepala Kepolisian Sektor Kota Manggala 1 orang dan Unit Reserse dan Kriminal Polsekta Manggala 3 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Sumber Data Primer

No	Nama	Informan	Ket
1	Kapolsek Manggala	1 orang	
2	Unit Reserse dan Kriminal Polsekta Manggala	3 orang	
Jumlah		4 orang	

Berdasarkan rincian sumber data tersebut, peneliti memilih sampel yaitu *sampel purposive*. Teknik sampel ini peneliti pilih berdasarkan pemahaman dan ilmu yang dimiliki *informan*, sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan *valid*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUH Perdata dan KUHAP (literatur-literatur lainnya yang terkait).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹ Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi kualitatif (*Qualitative Observation*)

Observasi kualitatif adalah. Ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.²

2. Wawancara kualitatif (*Qualitative Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Sesungguhnya wawancara tidak terlalu sederhana sebagaimana dibayangkan oleh seseorang. Sebab keberhasilan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XVII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308.

² John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran*. (Cet: I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.254.

tidak hanya ditentukan oleh *interview*, tetapi lebih dari itu tergantung bagaimana respondennya, situasinya, materi wawancara, waktu wawancara dan sebagainya.³ Agar proses wawancara berjalan dengan mulus sehingga mendapatkan data sesuai harapan, peneliti melakukan persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara (pewawancara, isi/materi wawancara, suasana saat wawancara) dan pencatatan hasil wawancara terkait mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ini.

3. Dokumentasi (*Qualitative documentary*)

Menurut penulis, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa fakta berupa gambar atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang ada di lokasi penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.⁴ Maka dari itu dibutuhkan alat bantu untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data selama penelitian berlangsung sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat. Adapun alat bantu yang dapat digunakan oleh peneliti yaitu :

1. Pedoman wawancara
2. Handpone (hp)
3. Tab recorder

³Suratman dan Philips Dillah, *Meode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 107.

4. Buku kecil/alat tulis

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Dalam teknik pengolahan data, data yang terkumpul belum memberikan apa-apa bagi tujuan penelitian ini, sebab data tersebut masih merupakan data mentah. Setelah data yang dibutuhkan telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan beberapa hal, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian. Suatu penelitian dituntut agar memenuhistandar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhistandar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam penelitian kualitatif, salah satu pengujian keabsahan data yang dilakukan adalah pengujian kredibilitas data (nilai kebenaran). Pengujian kredibilitas terhadap data hasil penelitian kultural antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dan peningkatan ketekunan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Kepolisian Sektor (Polsek) Manggala

Penelitian ini dilakukan di Kantor kepolisian Sektor Kota Manggala terletak di Jl. Lasuloro No. 171 Kecamatan Manggala Kota Makassar. Letak Kecamatan Manggala terletak di sebelah timur Kota Makassar dengan luas wilayah 24, 14 Km². Secara astronomis, Kecamatan Manggala terletak di antara 107⁰ BT sampai dengan 5⁰ LS pada bagian daratan rendah dengan ketinggian 6 fit dari permukaan air laut. Luas wilayah Kecamatan Manggala terdiri dari sawah, tambak, ladang, bangunan, hutang lindung, danau, rawa dan lain-lain. Kepolisian Sektor Manggala merupakan wilayah hukum dari Polrestabes Makassar yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, memberikan pelayanan, membangun kemitraan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Adapun wilayah Polsek Manggala terdiri dari beberapa kelurahan yaitu kelurahan Batua, kelurahan Borong, Kelurahan Antang, Kelurahan Manggala, Kelurahan Bangkala, dan Kelurahan Tamangapa. Jarak dari Polsek ke Polres yaitu 12,5 Km.¹

Kepolisian Sektor Manggala memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

a. Profersional.

Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola

¹Kompol Hasniati, *Kepala Kepolisian Sektor Manggala*, wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2017.

pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

b. Modern

Melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Amatsus dan Alpakam yang makin modern.

c. Terpercaya

Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna tewujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

2. Misi

- a. Berupaya melanjutkan informasi internal Polri.
- b. Mewujudkan organisasi dan postur yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada Kepolisian RI.
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian pro aktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan public melalui sinergitas polisional.

- h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan KKN.

Dalam setiap lembaga kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindari tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Polsek Manggala mempergunakan sistem pengorganisasian yaitu pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing. Adapun struktur Polsek Manggala, terdiri dari:

- 1) Kapolsek Manggala : Kompol Hasniati
- 2) Wakapolsek Manggala : Akp Abd.Muin
- 3) Kanit Provos : Ipda Yansi Raid
- 4) Kasi Umum : Aiptu Sjafriadi
- 5) Kasi Hukum : Aiptu Basri
- 6) Kasi Humas : Ipda M. Nasir
- 7) KA. SPTK A : Aiptu Yasin
- 8) KA SPKT B : Aiptu Maulana
- 9) KA SPKT C : Aiptu Roffi
- 10) Kanit Intelkam : Iptu M. Arifin
- 11) Panit 1 : Ipda H.M. Ashar
- 12) Panit 2 : Aiptu Ronny, BS
- 13) Kanit Reskrim : Iptu A. Huseng, S.H
- 14) Panit 1 : Ipda Armin

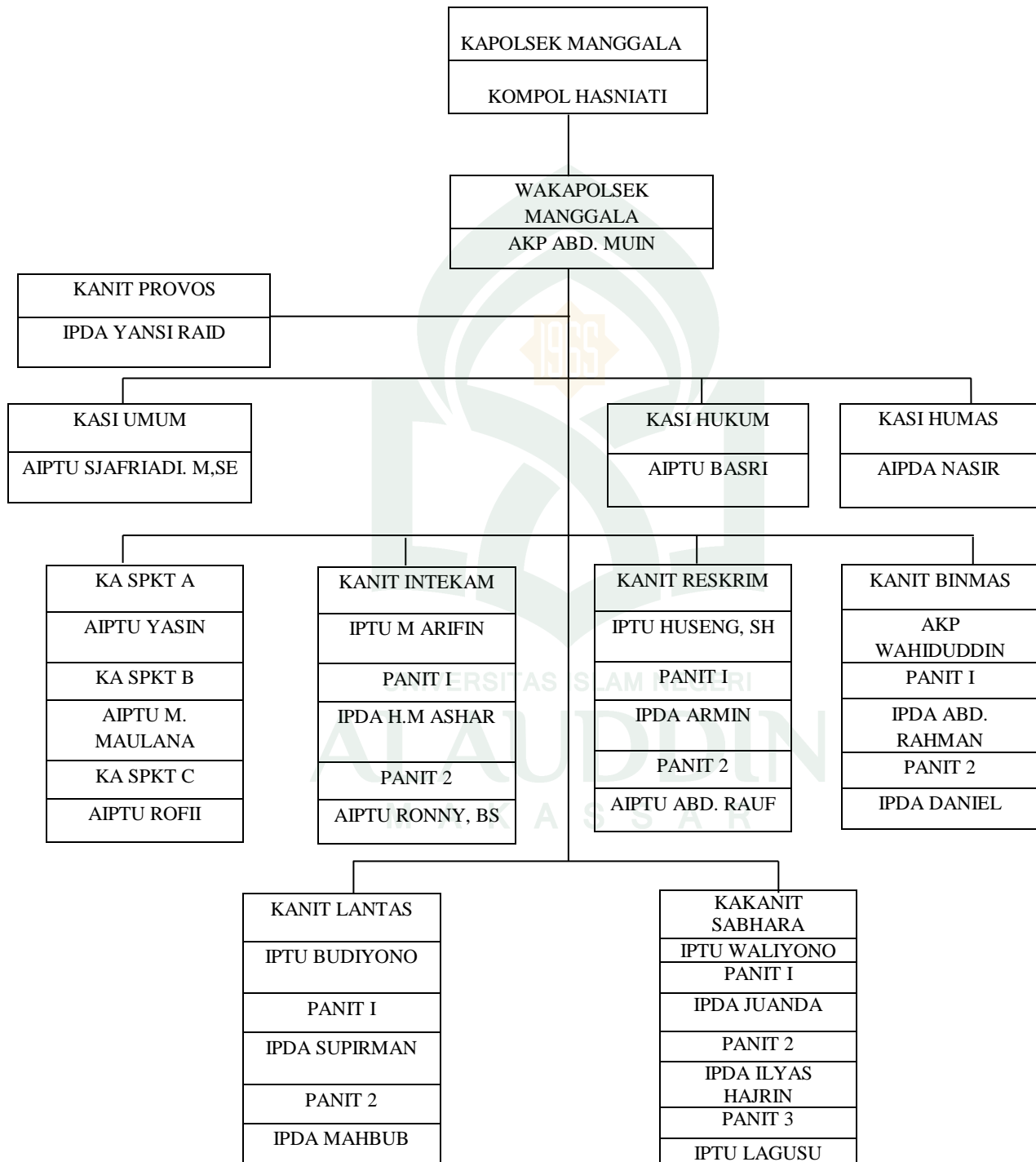
- 15) Panit 2 : Aiptu Abd. Rauf
 16) Kanit Binmas : AKP Wahiduddin
 17) Panit 1 Binmas : Ipda Abd. Rahman
 18) Panit 2 Binmas : Ipda Daniel. T
 19) Kanit Sabhara : Iptu Walinono
 20) Panit 1 Sabhara : Ipda Juanda
 21) Panit 2 Sabhara : ipda Ilyas Hairin
 22) Panit 3 Sabhara : Iptu Lagusu
 23) Kanit Lantas : Iptu Budiyo
 24) Panit 1 Lantas : Ipda Supirman
 25) Panit 2 Lantas : Ipda Mahbub

Polsek Manggala memiliki situasi kesatuan dengan kuat personil, sebagai berikut:

Table 4.1 Kuat Personil Polsek Manggala

No	SATFUNG	PAMEN	PAMA	BA	PNS	Jumlah
1	KAPOLSEK	-	1	-	-	1
2	WAKAPOLSEK	-	1	-	-	1
3	PROVOS	-	-	4	-	4
4	KASI UMUM	-	-	3	-	3
5	KASI HUMAS	-	-	-	-	-
6	KASI HUKUM	-	-	1	-	-
7	SABHARA	-	2	13	-	15
8	SPKT	-	-	6	-	6
9	LANTAS	-	2	6	1	9
10	BINMAS	-	2	8	1	11
11	RESKRIM	-	2	23	-	25
12	INTELKAM	-	-	8	-	8
13	BA POLSEK	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	10	72	2	84

Gambar 4.1 Struktur Organisasi polsek Manggala
STRUKTUR ORGANISASI POLSEK MANGGALA



B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum dan segala perangkat serta perwujudan darinya, tumbuh dan berkembang bersama berbagai faktor non hukum yang ada di lingkungan masyarakat seperti faktor ekonomi, serta adat istiadat, dimana faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang kemudian berimplikasi memandang hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial baik dipandang secara ekonomi maupun taraf pendidikan yang masing-masing memiliki pandangan berbeda-beda terhadap hukum yang kemudian mempengaruhi perilaku hukum mereka. Oleh karena itu, tercapainya tujuan hukum sangatlah dipengaruhi oleh perilaku hukum masyarakat sebagai objek dari hukum itu sendiri, dimana perilakunya sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan hukum. Karena tujuan hukum yaitu keadilan, dan kepastian hukum yang hendaknya melandasi perilaku hukum dalam masyarakat.

Keadilan dalam hukum : Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan manusia dengan kedudukan yang sama didepan hukum.

Kepastian dalam hukum : Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Kemanfaatan dalam hukum : Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita yang adil dan makmur, bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya melawan hukum.

Mediasi (damai) merupakan salah satu perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat, dimana dalam masyarakat ada yang dikenal dengan kerukunan dalam pergaulan hidup antar sesama warga negara atau adat istiadat. Mediasi biasanya dikenal dan dipergunakan dalam hukum perdata baik formil maupun materil dimana kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan. Meskipun demikian, masyarakat juga mengenal istilah mediasi dalam hukum pidana yaitu menyelesaikan perselisihan mereka baik di mediasi oleh pihak kepolisian maupun tanpa aparat kepolisian.

Kepolisian merupakan instuisi penegak hukum di tingkat pertama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani perkara pidana sebelum perkara dilimpahkan ke Kajaksaan dan Pengadilan. Dalam perkembangan sistem pidana di Indonesia, maka Kepolisian menyelesaikan perkara pidana tidak selalu mengedapankan jalur litigasi melainkan jalur non-litigasi melalui pendekatan *Restorative Justice*. Jalur nonlitigasi digunakan di Kepolisian dalam menangani perkara pidana sebagai penyeimbang jalur litigasi dilihat dari sisi kerugian yang dialami dan sisi keadilan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru dikemudian hari. Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal tidak dikenal dengan KUHP, namun seiring berjalannya waktu dan berdasarkan keadilan mengembangkan suatu situasi untuk kondisional tertentu agar perkara tidak selalu berujung ke Pengadilan. Walaupun pada umumnya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak

ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, inilah yang dikenal dengan mediasi penal.

Hal ini diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Namun surat edaran Kapolri tersebut rupanya belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum mediasi penal. Akan lebih efektif apabila substansi dari kebijakan Kapolri tersebut di kodifikasikan dalam sebuah regulasi positif, sehingga tidak ada keraguan dari aparat untuk menyelenggarakan mediasi dalam penanganan perkara pidana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Kota Manggala, penyelesaian tindak pidana penganiayaan terkadang diselesaikan dengan cara mediasi namun tidak sering juga. Kurang lebih 50% per tahun, kasus tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan melalui cara mediasi penal. Pelaksanaan mediasi penal di Polsek Manggala tidak serta merta kehendak dari penyidik, melainkan berdasarkan pada kedua belah pihak yang berperkara demi keadilan sosial yang pelaksanaanya mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab dan Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Penyidik Polsek Manggala bisa mengupayakan penyelesaian tindak penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan secara mediasi penal kehendak kedua belah pihak yang berselisih dan dengan melihat serta menilai dampak kerugian oleh korban penganiayaan biasa maupun penganiayaan ringan bisa berangsur cepat sembuh atau menimbulkan cacat. Namun untuk penganiayaan berat, kecil kemungkinan penyidik akan mengupayakan melalui mediasi penal.²

Pilihan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi penal sudah menjadi kebiasaan diantara mereka yang tersangkut kasus tindak pidana yang dilaporkan pada pihak kepolisian khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga.³ Masyarakat memilih menyelesaikan perselisihan atau konflik khususnya penganiayaan biasa dan ringan melalui mediasi penal dengan pertimbangan bahwa melalui mediasi penal dianggap paling murah dan tidak rumit serta tidak menghabiskan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Selain itu

²Iptu Armin, *Panit II Reskrim Kepolisian Sektor Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2017.

³Aipda Anton Lembang, *Katim Riksa II Kepolisian Sektor Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 21 Maret 2017.

penyelesaian konflik melalui mediasi, dapat menjalin hubungan baik antara pihak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.⁴

Tindak pidana atau permasalahan yang terjadi di masyarakat baik perorangan dengan perorangan maupun antar kelompok yang berujung pada dilaporkannya salah satu pihak kepada aparat kepolisian dapat disebabkan oleh banyak faktor, khususnya di wilayah hukum Polsek Manggala. Salah satu faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat terjadi karena kurangnya komunikasi diantara mereka dalam menyelesaikan masalahnya yang kemudian melahirkan kesalahpahaman dan ketersinggungan diantara mereka. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan.⁵

Pihak tersangka dan korban yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan biasanya masih memiliki hubungan keluarga, sehingga permintaan berdamai datang dari kedua belah pihak yang mereka sadari setelah adanya pemanggilan awal oleh penyidik kepolisian. Hal ini dikarenakan karena kurangnya komunikasi yang terjalin diantara mereka apalagi dalam hal menyelesaikan masalah mereka.⁶

Berdasarkan hasil wawancara, alasan tersangka melakukan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan di Polsek Manggala adanya penyesalan dan kesadaran bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan disadari hanya emosi sesaat. Selain itu, juga untuk menjaga hubungan baik dengan korban.

⁴Iptu Armin, *Panit II Reskrim Kepolisian Sektor Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2017.

⁵Kompol Hasniati, *Kepala Kepolisian Sektor Manggala*, wawancara langsung pada tanggal 20 Februari 2017.

⁶Aipda Anton Lembang, *Katim Riksa II Kepolisian Sektor Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2017.

Mengingat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga dan rasa takut apabila harus masuk penjara.⁷

Selain faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas, mental dan komitmen aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian juga sangat berpengaruh terhadap ditempuhnya mediasi oleh pelaku maupun korban tindak pidana penganiayaan, dimana aparat kepolisian yang berperan untuk mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat merupakan ujung tombak yang berada digaris depan proses penegakan hukum. Pemberian keringanan dan kebijaksanaan kepada tersangka maupun korban untuk menyelesaikan masalah tindak pidana penganiayaan secara mediasi pena lebih kepada pertimbangan manfaat dari hukum itu sendiri, karena rasa keadilan dimasyarakat tidak mesti melalui putusan pengadilan, dan juga mempertimbangkan tingkat kejahatan (tindak pidana) yang mereka lakukan, dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka maupun korban (pertimbangan-pertimbangan yang diajukan),apabila masih dimungkinkan untuk didamaikan maka proses hukum biasanya tidak berlanjut atau dihentikan.⁸

⁷Aipda Anton Lembang, *Katim Riksa II Kepolisian Sektor Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 21 Februari 2017.

⁸Kompol Hasniati, *Kepala Kepolisian Sektor Manggala*, wawancara langsung pada tanggal 20 Maret 2017.

C. Akibat Hukum dari Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Penyelesaian suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan pada dasarnya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pada umumnya melalui beberapa proses dan tahapan antara lain:

1. Pelaporan

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1 ayat 24 KUHAP)

2. Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat 5 KUHAP)

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).

4. Penuntutan

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 ayat 7 KUHAP).

5. Persidangan

Proses mengadili oleh hakim berdasarkan Pasal 1 ayat 9 KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

6. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian pada Polsek Manggala, apabila terjadi suatu tindak pidana penganiayaan dan telah dilaporkan serta tercantum dalam laporan polisi, maka penyidik dalam hal ini Kanit Reskrim memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan tersebut baik pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangannya. Apabila dalam pemeriksaan awal terdapat cukup bukti sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana penganiayaan, maka penyidik meminta izin kepada Kepala Kepolisian Polsek Manggala untuk dilakukannya Penyidikan.⁹

Dalam proses penyidikan, penyidik mengeluarkan perintah penangkapan dan penahanan. Pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 21 menjelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh

⁹Iptu A. Huseng, *Kanit Reskrim Polsek Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 24 Februari 2017.

penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁰

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana murni yang penyelesaiannya harus berhadapan dengan Negara dan tidak mengenal adanya perdamaian atau mediasi untuk menghentikan proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. Namun di Kepolisian Sektor Kota Manggala dalam tindak pidana penganiayaan ringan dan biasa tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Dalam mediasi tersebut, bukan berarti untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan. Masyarakat sangat mengutamakan dan menginginkan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum meskipun tindak pidana penganiayaan tidak dapat di mediasi. Masyarakat sangat kental dengan adat istiadat bugis Makassar yang menyelesaikan perselisihan melalui cara kekeluargaan daripada melalui jalur ke Pengadilan. Mediasi ini dilakukan selama pihak yang berselisih memungkinkan untuk didamaikan dan jika kedua belah pihak setuju, maka perkara dalam tindak pidana penganiayaan tersebut didamaikan dan dianggap telah selesai.¹¹

Secara teknis, penyidik Polsek Manggala tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polsek Manggala karena dalam pelaksanaannya penyidik memberikan kebebasan kepada para

¹⁰Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHPA*, h. 633-634.

¹¹Iptu A. Huseng, *Kanit Reskrim Polsek Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 24 Februari 2017.

pihak yang berperkara untuk memilih penyelesaian perkaranya melalui jalur litigasi atau nonlitigasi sesuai dengan rasa keadilan mereka rasakan, akan tetapi penyidik Polsek Manggala memberi kelonggaran penyelesaian perkaranya dengan melihat, menilai dengan tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan serta dampak yang ditimbulkan.

Keunggulan yang dipakai dalam oleh penyidik Polsek Manggala adalah dengan prioritas tindak pidana penganiayaan melalui prioritas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi apabila antara korban dan pelaku penganiayaan beserta keluarganya serta tokoh masyarakat jika dibutuhkan telah bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai. Penyidik hanya sebagai mediator dan meluruskan masalah jika dalam bernegosiasi terdapat hal-hal yang terlalu memberatkan diantara kedua belah pihak yang berperkara. Tindakan penyidik tersebut dilakukan apabila telah mendapat rekomendasi dari Kanit Reskrim Polsek Manggala. Jika proses mediasi terlaksana, maka proses penyidikan dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan. Pelaku dan korban menandatangani akta perdamaian. Selain itu pelaku harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.¹²

D. Prespektif Hukum Islam terhadap Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan *Islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan

¹²Iptu A. Huseng, *Kanit Reskrim Polsek Manggala*. Wawancara langsung pada tanggal 24 Februari 2017.

mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan. Selain *Islah*, dikenal juga dengan istilah *Hakam* yang berarti pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara para pihak yang berselisih sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan perselisihan mereka.¹³

Penganiayaan dalam hukum Islam termasuk jarimah *qishash/diat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.¹⁴ Dalam kategorisasi hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan dengan upaya damai adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (*muamalah wa ahwal al-syakhsiyah*). Sedangkan dalam dimensi hukum public atau perkara pidana seperti zina, *qadhaf*, pencurian, minum khamar, dan lain-lain tidak dapat dilakukan upaya damai, karena disitu terdapat hak Allah secara murni. Hisyam Ramadan menyebutkan dalam kasus *qishash-diyat* terdapat celah untuk menerapkan *islah* atau upaya damai. *Islah* dalam konteks ini, bukan menghapus hukum *qhisah*, tetapi dalam hal ketika hukuman *qisash* tidak dapat dijalankan, karena ahli waris memaafkan pelaku penganiayaan dan pembunuhan, maka *islah* disini dapat dilakukan termasuk kemampuan pembayaran

¹³Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Edisi I (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 119.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich. *Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.18.

diyat. *Islah* dapat dilakukan dalam kasus *qishash diyat*, karena pemaafan yang diberikan oleh ahli waris korban merupakan hak manusia (*haq al-adam*).¹⁵

Al-Qur'an menjelaskan bahwa konflik yang terjadi dikalangan manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan konflik, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian konflik tersebut. Maksud dari jinayat di sini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan tersebut. Dalam sanksi-sanksi *'uqubat terdapat haq* seorang hamba. Dan selama berkaitan dengan *haq* hamba, maka bagi pemilik *haq* (*shâhibul haq*) boleh memberikan ampunan, dan menggugurkan *haqnya*.¹⁶

Ketentuan mengenai *qishas* terdapat dalam al-Qur-an. Qs. al-Baqarah/2:178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹⁵ Syarizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet II; Jakarta: Kencana, 2011) h.164

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, h. 163.

Terjemahnya:s

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”¹⁷

Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena maaf dapat menyadarkan orang atas kekeliruannya. Memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain dapat mengontrol kemarahan. Selama di dalamnya tidak ada haq Allah swt. maka pemaafan dari shahibul haq telah mewajibkan pengampunan dari hâkim. Hâkim harus memberikan pemaafan bagi pelaku penganiayaan dengan pemaafan yang sempurna karena adanya pemaafan dari shâhibul haq. Tidak bisa dikatakan bahwa di dalam jinayat tersebut terdapat haq kolektif rakyat, yaitu keamanan. Tidak bisa dikatakan demikian, karena keberadaan haq kolektif bagi rakyat di dalam jinayat membutuhkan suatu dalil yang menunjukkan hal itu, padahal tidak ada dalil atas yang demikian itu. Sebab, apa yang dilakukan di masa para shahabat ra, bahwa jika pelaku penganiayaan dimaafkan oleh shâhibul haq, maka mereka menggugurkan sanksi bagi pelaku penganiayaan tersebut.¹⁸

Peradilan pidana Islam memberikan solusi banyak alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat,

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 27 .

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, h. 143.

Negara, dan pelaku. Menurut Amin Suma, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah yang bias diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana Islam, seseorang melakukan pembunuhan atau penganiayaan jika keluarga korban memaafkan, maka pelaku bebas sama sekali dari hukum.¹⁹

Oleh karena itu konsep penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam hukum Islam jauh lebih baik dibandingkan dengan konsep penyelesaian perkara pidana dalam hukum Nasional. Penyelesaian perkara pidana seperti penganiayaan dalam hukum Islam diperbolehkan untuk didamaikan dengan membayarkan denda kepada pihak pelaku. Dengan pembayaran denda tersebut, dapat mengurangi derita dari keluarga korban tersebut.



¹⁹ Umar Al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam* diakses pada tanggal 16 Agustus 2017, h.450

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor pembinaan hubungan baik karena pada umumnya pihak dan korban memiliki hubungan keluarga, tetangga, dan pertemanan. Selain itu, faktor pertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka maupun korban (pertimbangan-pertimbangan yang diajukan), apabila masih dimungkinkan untuk didamaikan .
2. Akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan itu adalah jika proses mediasi penal terlaksana, maka proses penyidikan di Polsek Manggala dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan. Pelaku dan korban menandatangani akta perdamaian. Selain itu, pelaku harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
3. Konsep penyelesaian perselisihan seperti dalam mediasi juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan *Islah* dan *Hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamalkan untuk saling

memaafkan. Didalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk jarimah *qishash-diyat*. *Islah* dalam konteks ini, bukan menghapus hukum *qhisash*, tetapi dalam hal ketika hukuman *qisash* tidak dapat dijalankan, karena ahli waris memaafkan pelaku penganiayaan dan pembunuhan, maka *islah* disini dapat dilakukan termasuk kemampuan pembayaran *diyat*. *Islah* dapat dilakukan dalam kasus *qishash diyat*, karena pemaafan yang diberikan oleh ahli waris korban merupakan hak manusia (*haq al-adam*)

B. Implikasi

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan menarik kesimpulan maka kemudian implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu membuat undang-undang dan batasan-batasan untuk tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal di tingkat Kepolisian
2. Pemerintah perlu membuat undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya dilapangan ada dasar hukumnya yang jelas
3. Praktik penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasi dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syaria'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syaria'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amriani, Nurmaningsi. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bachri, Nur Aisyah. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*, Universitas Hasanuddin: Makassar, Repository.unhas.ac.id diakses pada 8 Desember 2016.
- Baroroh, Hani Barizatul. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012). h. 196. Ejournal.uin-suka.ac.id diakses tanggal 15 Juni 2017.
- Baroroh, Hani Barizatul. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Yogyakarta: Universitas Islam Kalijaga, 2012. Ejournal.uin-suka.ac.id diakses tanggal 15 Juni 2017.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Islami Publishing.
- Fatimah. *Studi Kritis terhadap Pertautan antara Hukum Islam & Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Makassar : Alauddin University Press, 2014.
- Mansyur, Ridwan. *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Marpaun, Ledeng. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Ed. I; Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi
- Redaksi Sinar Grafika. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*. Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

- Rustan. *Integrasi Mediasi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Cet. I; Makassar: Dua Satu Press, 2014.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sudiarto, Zaeni Asyhadle. *Mengenal Arbitras*. Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suratman, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.
- Wacana Intelektual, *Kumpulan Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUHP*.
- Widjaja, Gunawan, dkk. *Hukum Arbitrase*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI PENELITIAN





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 12 Tahun 2017
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2017**

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Usman, MA
2. Dr. Sohrah., M. Ag
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Susianti
NIM : 10300113182
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Manggala)
b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 12 Januari 2017
Dekan

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.
424836

Samata, 12 Januari 2017

Nomor : SL2/PP.00.9/ 24 /2017
Hal : **Undangan Seminar Proposal Skripsi**
An. Sdr (i). Susianti

Kepada YTH.

1. Prof. Dr. Usman, MA (Pembimbing I)
2. Dr. Sohrah., M. Ag (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 19 Januari 2017
Waktu : 13.00 wita
Tempat : Ruang LT Lantai 1 Fak. Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Mediasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif
Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polres
Manggala)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Ketua Jurusan,
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Dr. Aila Sastrawati, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: ~~2517~~ /HPK/2017

Judul Skripsi: Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Nasional
dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polsek Manggala)

Gowa, 30 Januari 2017

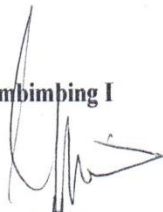
Penyusun,



SUSIANTI

Nim. 10300113182

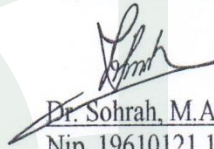
Pembimbing I



Prof. Dr. Usman, MA

Nip. 195809901 199102 1 001

Pembimbing II



Dr. Sohrab, M.Ag

Nip. 19610121 199203 2 002

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



ALAUDDIN
MAKASSAR

Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 987/S.01P/P2T/02/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kapolsek Manggala

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/379/2017 tanggal 30 Januari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SUSIANTI**
Nomor Pokok : 10300113182
Program Studi : HPK
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI POLSEKTA MANGGALA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 s/d 28 Februari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Februari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 02-02-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



**POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR MANGGALA
Jalan Lasuloro Raya No. 171 Makassar**



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 121 / III / 2017 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Sektor Manggala menerangka Bahwa :

N a m a : SUSIANTI
Tempat / Tgl.Lahir : Sinjai, 20 Juli 1995
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jln. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa
Kab. Gowa.

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Polsek Manggala terhitung sejak tanggal 06 s/d 28 Februari 2018 dengan judul penelitian :

“ MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI POLSEK MANGGALA) “

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M a k a s s a r
Pada Tanggal : 10 Maret 2017



KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MANGGALA

HASNIATI
KOMISARIS POLISI NRP 66120280

Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Sarnata – Gowa.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yassin Lingko No. 36 Sarmata Sarunggumina - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : SI.I/PP.00.9/2417/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Sarmata, 19 Juli 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dra. Nila Sastrawati, M.SI (Sekretaris)
 3. Dr. Abd.Rahman, M.Pd (Penguji I)
 4. Dr. Rahmiati, M.Pd. (Penguji II)
 5. Prof. Dr. Usman, M.A (Pembimbing I)
 6. Dr. Sohrah, M.Ag (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Susianti
N I M : 10300113182
Jurusan : Hukum Pidana Ketatanegaraan (HPK)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2017
Waktu : Pukul 11.00-12.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan HPK

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1173 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Susianti
N I M : 10300113189
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan (HPK)
Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skrripsi
Judul : "Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif
Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Polsek
Mangala) "

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah /Skrripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Munaqasyah/Skrripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Abdul Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D.
Penguji II : Rahmiati, M.Pd
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skrripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 09 Agustus 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa;

